# LAPORAN KINERJA (LKj)

## DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

## TAHUN 2022

**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**TAHUN 2023**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja Tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dapat diselesaikan pada waktunya.

Penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022. Dalam dokumen ini dimuat berbagai keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang diwujudkan dalam bentuk pengukuran capaian kinerja output, kinerja program, dan kinerja sasaran.

Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung ini diharapkan dapat menggambarkan capaian pelaksanaan kegiatan, program, dan sasaran kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Tahun Anggaran 2022.

**Bandar Lampung, Februari 2023**

**KEPALA DINAS,**

**ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.**
Pembina Utama Muda
NIP. 19730524 199703 2 002

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung di susun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara periodik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang di tetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran. LAKIP digunakan sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yang memuat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dengan kegiatan yang terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Sasaran berdasarkan Revisi Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis. Sasaran strategis pada Renstra (Revisi) tersebut adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan; 2. Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan; 3. Meningkatnya nilai Perdagangan Luar Negeri; 4. Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting.

Hasil capaian kinerja menunjukkan keempat (4) sasaran strategis capaiannya sangat tinggi yaitu : 1. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan 27,24% 2. Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan 100%; 3. Meningkatnya nilai Perdagangan Luar Negeri 100%; 4. Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting 100%. Dari hasil pengukuran kinerja baik dalam pencapaian kinerja sasaran maupun kinerja keuangan, yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan tahun 2022 secara keseluruhan menunjukkan persentase yang cukup memuaskan, walaupun untuk pencapaian kinerja pertumbuhan sector industry tergolong sangat rendah. Hal tersebut terkait dalam pelaksanaan masih banyak dijumpai beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Namun dalam kondisi keterbatasan tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung telah berupaya secara maksimal mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, baik melalui kebijakan, program dan kegiatan yang dikelola pada tahun anggaran 2022.

## DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** …..... i
**KHTISAR EKSEKUTIF** ……..... ii
**DAFTAR ISI** ……..... iii
**DAFTAR TABEL** ……..... v
**DAFTAR GAMBAR** ……..... vi
**DAFTAR GRAFIK** ……..... vii

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Gambaran Umum Dinas Peindustrian dan Perdagangan…. 2
1.3. Tugas dan Fungsi ..... 6
1.4. Isu Strategis ..... 7
1.5. Landasan Hukum ..... 8
1.6. Sistematika ..... 9

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

2.1. Perencanaan Strategis 2019-2024 ..... 10
a. Visi dan Misi..... 12
b. Tujuan, Sasaran dan Indikator ..... 12
c. Indikator Kinerja Utama..... 16
d. Perjanjian Kinerja Perubahan 2022..... 18

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja ..... 19
3.2. Capaian Tujuan dan Indikatro Kinerja Utama……... 21
3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja……. 67
3.4. Akuntabilitas Keuangan Pagu & Realisasi Anggaran..... 68
3.5. Prestasi yg dicapai Disperindag Provinsi…….. 73
3.6. Inovasi Terbaru ..... 73
3.7. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi..... 74

**BABIV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan..... 77

**LAMPIRAN**

1. Matrik CCD Perubahan Renstra 2019-2024
2. Perubahan SK IKU

## DAFTAR TABEL

**Halaman**


Tabel 1.1 Aset yang dikuasai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung .....3

Tabel 1.2 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung ..... 6

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Sebelum Perubahan RPJMD Provinsi Lampung ..... 14

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Setelah Perubahan RPJMD Provinsi Lampung ……. 15

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Sebelum Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung..... 16

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Setelah Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung..... 17

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2022 ……...…….. 18

Tabel 2.6 Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 (APBD-P) ……. 18

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran Provinsi Lampung Tahun 2022..... 20

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Setelah Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2022..... 21

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung ..... 23

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2022 ..... 23

Tabel 3.5 Pencapaian Target Misi ..... 24

Tabel 3.6 Analisis Pencapaian Sasaran..... 25

Tabel 3.7 Permasalahan, Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat serta Solusi dalam Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan……... 26

Tabel 3.8 Permasalahan, Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat serta Solusi dalam Pertumbuhan Sektor Perdagangan……. 45

Tabel 3.9 Permasalahan, Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat serta Solusi dalam Perdagangan Luar Negeri…….. 55

Tabel 3.10 Data Ekspor Non Migas Provinsi Lampung Tahun 2018-2022 ..... 57

Tabel 3.11 Ekspor Berdasarkan Komoditi Unggulan Provinsi Lampung Tahun 2021-2022 ..... 57

Tabel 3.12 Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Provinsi Lampung Tahun 2021-2022 ..... 58

Tabel 3.13 Perbandingan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi Lampung dengan Nilai Ekspor Non Migas Nasional ..... 58

Tabel 3.14 Permasalahan, Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat serta Solusi dalam Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pangan Pokok Penting……. 64

Tabel 3.15 Pencapaian Target Misi Berdasarkan Permendagri 86/2017…….. 68

Tabel 3.16 Program dan Pagu Anggaran 2022 ..... 68

Tabel 3.17 Perbandingan Kinerja dan Anggaran …… ..... 70

# DAFTAR GAMBAR

**Halaman**

Gambar 1.1 Rekapitulasi Data PNS Berdasarkan Golongan Ruang..... 2
Gambar 1.2 Data PNS Berdasarkan Pendidikan..... 2
Gambar 1.3 Data Pegawai Non PNS Berdasarkan Pendidikan ..... 3

# DAFTAR GRAFIK

**Halaman**

Grafik 3.1 Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB ..... 26
Grafik 3.2 Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB..... 43
Grafik 3.3 Perkembangan Nilai Ekspor Non Miga……... 53
Grafik 3.4 Andil Inflasi Bahan Makanan…….. 62

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Sistem tata kelola pemerintahan pada dasarnya dituntut agar berdaya guna, berhasil guna, bersih, transparan serta akuntabel maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Petunjuk teknis lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan

akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## 1.2 Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sampai dengan Desember tahun 2022, Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Lampung memiliki 133 orang pegawai yang terdiri dari 104 Pegawai Negeri Sipil dan 29 orang Non Pegawai Negeri Sipil. Ketersediaan PNS dan Pegawai Non PNS berdasarkan kelompok golongan ruang dan tingkat pendidikan sebagai berikut :

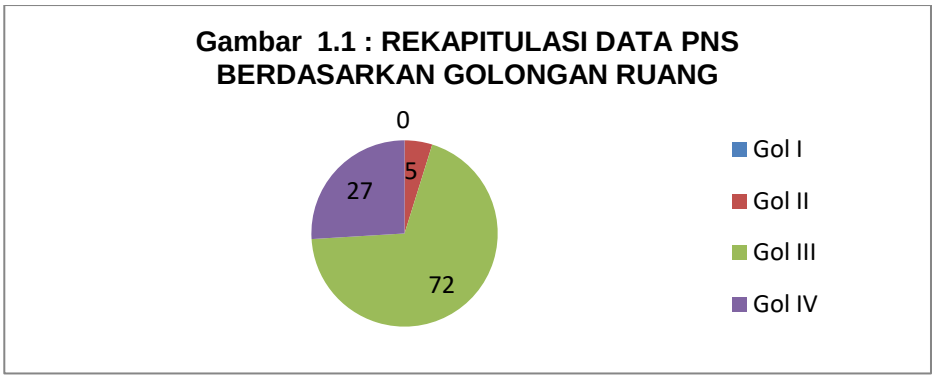


*Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung*

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, sebaran golongan ruang PNS pada DINAS Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang terendah adalah golongan II, sedangkan golongan ruang yang tertinggi adalah golongan IV. Jumlah PNS dengan golongan III adalah golongan ruang terbanyak dengan jumlah sebanyak 72 orang, kemudian PNS dengan golongan ruang IV sebanyak 27 orang, sedangkan yang terendah golongan ruang II dengan jumlah sebanyak 5 orang.

Gambar 1.2 : Data PNS berdasarkan pendidikan

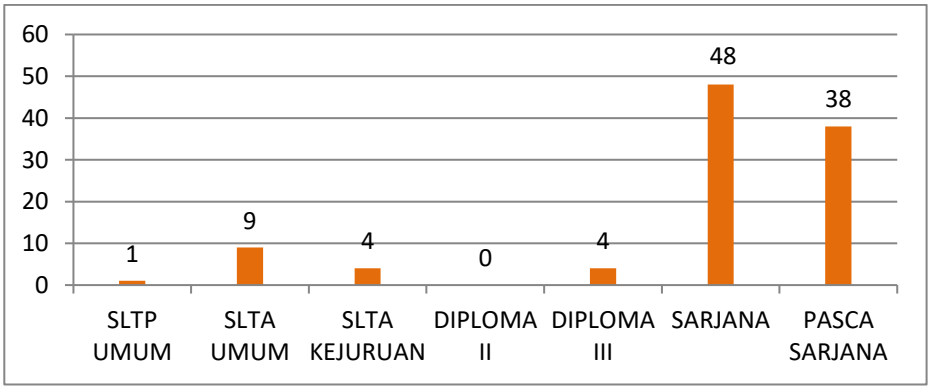


*Sumber : Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Lampung*

Berdasarkan gambar 1.2 diatas, tingkat pendidikan PNS pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang terendah adalah SLTP dengan jumlah 1 orang, sedangkan tingkat pendidikan yang tertinggi adalah S2/Pasca Sarjana dengan jumlah sebanyak 38 orang. PNS dengan pendidikan sarjana adalah yang terbanyak dengan jumlah sebanyak 48 orang. Sedangkan ketersediaan pegawai non PNS pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar berikut:

Gambar 1.3 : Data Pegawai Non PNS berdasarkan pendidikan

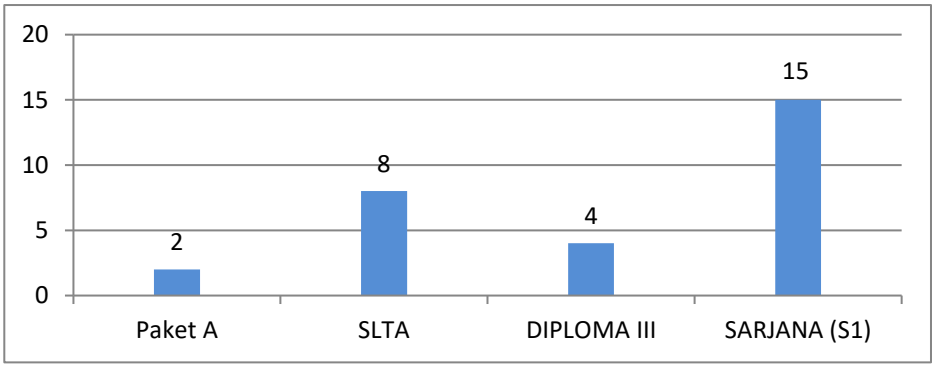


*Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung*

Berdasarkan gambar 1.3 diatas, rentang tingkat pendidikan pegawai non PNS di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung adalah dari Paket A dengan tingkat pendidikan yang terendah kemudian pendidikan Sarjana merupakan tingkat pendidikan tertinggi. Untuk pegawai non PNS dengan tingkat pendidikan Paket A berjumlah sebanyak 2 orang, tingkat pendidikan SLTA sebanyak 8 orang, tingkat pendidikan diploma sebanyak 3 orang dan tingkat pendidikan sarjana sebanyak 15 orang.

Dalam pengelolaan asset sampai dengan Desember 2022, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung memiliki jumlah asset sebagaimana tabel di halaman selanjutnya.

Tabel 1.1. Aset yang dikuasai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan

| No. | Nama Bidang Barang | Jumlah Aset | Nilai Aset |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanah | 11 | 1.914.568.000 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 3.679 | 10.759.818.540 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 41 | 10.033.495.017 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 11 | 262.767.975 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 1 | 201.552.000 |
| **TOTAL** | | **3.743** | **23.172.201.532** |

*Sumber : Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Lampung*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung memiliki asset berupa tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jala, irigasi dan jaringan; dan asset tetap lainnya. Aset Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung berada di Kota Bandar Lampung, Pringsewu dan Lampung Selatan.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung untuk melaksanakan serta menunjang tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Struktrur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

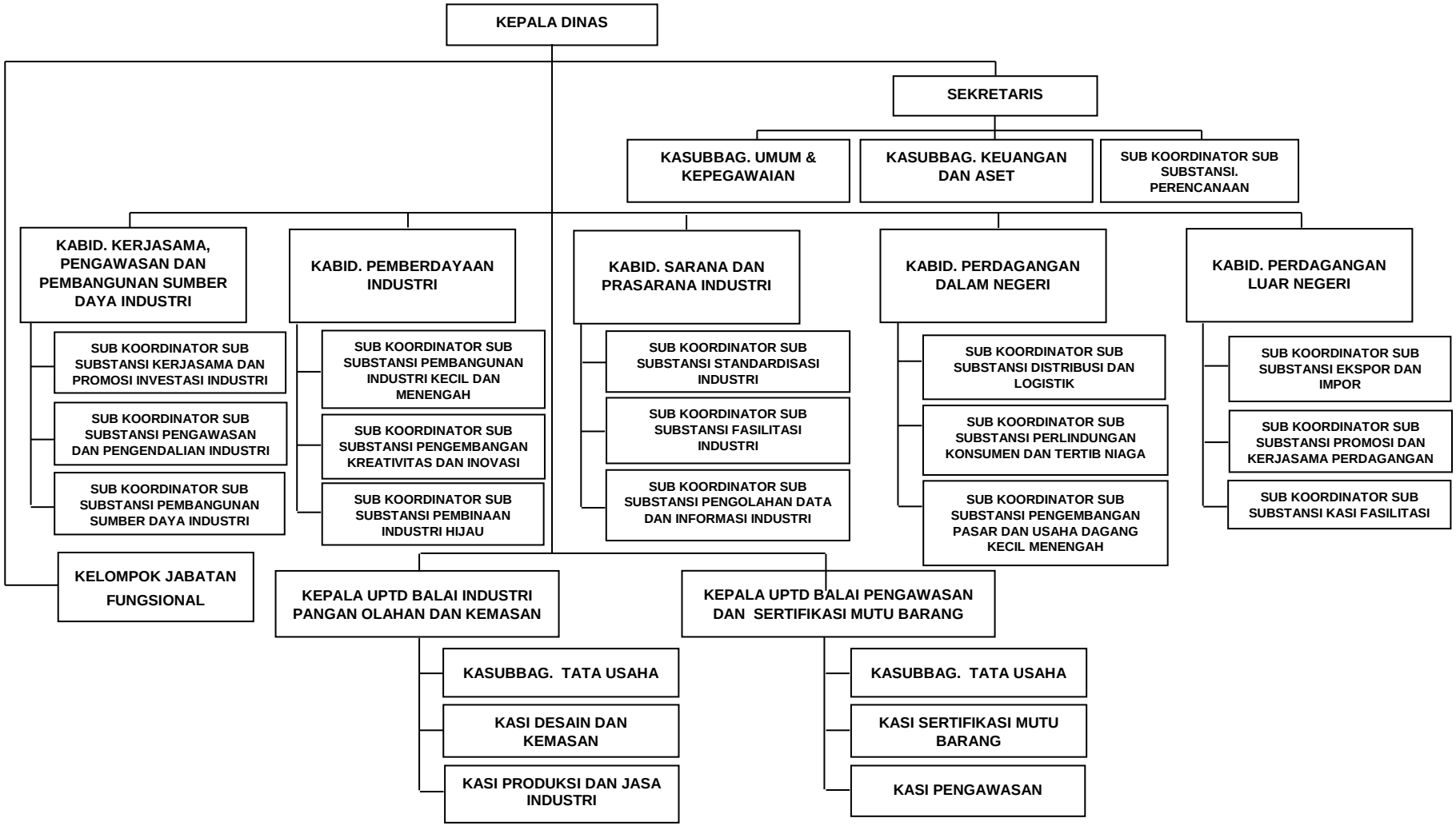

## 1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung No. 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung bergabung menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Kemudian berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama, pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri serta sarana dan prasarana industri;
b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerja sama, pengawasan , pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri serta sarana dan prasarana industri;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kerja sama , pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri serta sarana dan prasarana industri;
d. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar di bidang perindustrian dan perdagangan;
e. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi kegiatan perdagangan;
f. Pengembangan iklim dan kondisi pertumbuhan dan pemasyarakatan perdagangan;
g. Penyediaan bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor;
h. Pembinaan dan pengendalian kemetrologian skala provinsi;
i. Pembinaan dan fasilitas tugas pembantuan dalam pengawasan pemberdayaan perdagangan di Provinsi Lampung;
j. Pembinaan dan penetapan serta kebijakan perlindungan Penumbuh kembangan iklim usaha perdagangan di Provinsi Lampung;
k. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan perdagangan di Provisni Lampung dan lintas kabupaten/kota;
l. Pelayanan administrasi; dan
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

## 1.4 Isu Strategis

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menghadapi permasalahan yang sangat kompleks sebagaimana isu-isu strategis berikut:

**Sektor Industri**

- Pemulihan dampak pandemi dengan membangkitkan kembali IKM, melalui fasilitasi, pelatihan, pembinaan, dan bantuan kepada IKM;
- Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan berbahan baku produk pertanian (secara luas) untuk peningkatan nilai tambah;
- Masih terbatasnya kemampuan IKM dalam hal penerapan standar mutu/kualitas (PIRT, BPOM, HALAL), penggunaan teknologi dan inovasi, diversifikasi produk, serta pengemasan;
- Belum optimalnya potensi kerjasama antara IKM dengan perusahaan besar dan BUMN/BUMD;
- Promosi produk IKM belum optimal, baik secara digital maupun non digital (Kerjasama dengan BUMD dan Dekaranasda);
- Penetapan 4 (empat) Kawasan Industri Prioritas Nasional di Provinsi Lampung pada RPJMN 2020—2024;
- Promosi peluang investasi bidang industri dan investasi pada Kawasan Industri.

**Sektor Perdagangan**

- Pemulihan dampak pandemi dengan meningkatkan akses pasar bagi IKM/PKM, baik promosi produk secara digital (*e-commerce*/media sosial) maupun berupa event/bazar/galeri UMKM, serta bantuan pendaftaran merk dagang.
- Fluktuasi harga komoditi pertanian, terutama bahan pangan pokok masih tinggi, terutama menurunnya harga pada saat panen raya.
- Pengembangan dan diversifikasi produk ekspor potensial belum optimal;
- Keterbatasan data dan informasi tentang perdagangan antar daerah, serta akses pasar dalam dan luar negeri untuk produk unggulan daerah;
- Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait guna menjaga pergerakan harga bahan pangan pokok dan barang penting;
- Perlindungan terhadap konsumen belum optimal, melalui mekanisme pengaduan dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen.

## 1.5 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Provinsi (LKIP) Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendataan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
16. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 060/0057/07/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Permintaan Data Capaian IKU Provinsi Lampung.

## 1.6 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lampung Lampung Tahun 2022 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum yaitu Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi PD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama dan Perubahan Perjanjian Kerja Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Kerangka Pengukuran Kinerja Peraruran Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017, Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

Meliputi Simpulan dari Perencanaan Strategis dan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Periode Perubahan Rencana Strategis.

# BAB II
# PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 2.1 Perencanaan Strategis 2019 - 2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri 86 Tahun 2017 serta tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap perangkat daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD).

RENSTRA Perangkat Daerah merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang menjelaskan lebih detail Rencana Pembangunan Suatu SKPD. RPJMD itu sendiri merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang disusun dengan berpedomanan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat Visi, Misi dan Program Presiden beserta arah kebijakan nasional. Penyusunan RPJMD Provinsi merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih dilantik pada tanggal 12 Juni 2019, sampai dengan penetapan Perda tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD pada tahun 2018 lalu sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hasil dari Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Selanjutnya, Rancangan Awal disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Provinsi Lampung serta hasil konsultasi ke Menteri Dalam Negeri. Rancangan awal RPJMD yang telah

disempurnakan selanjutnya menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Hasil dari penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi masukan untuk perumusan Rancangan RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD. Hasil musrenbang RPJMD menjadi masukan untuk penyempurnaan menjadi rancangan Akhir RPJMD. Rancangan Akhir RPJMD selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD. Setelah disetujui, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri. Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, yang selanjutnya ditetapkan dengan Perda tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Kemudian dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024 akan menjadi dasar bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Renstra OPD Tahun 2019-2024, menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kab/Kota di Provinsi Lampung, serta menjadi Instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. Pada tahun 2021 telah dilakukan revisi terhadap RPJMD Provinsi Lampung, begitu juga dengan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Rencana Strategis Perangkat Daerah harus memperhatikan semangat pembangunan, visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD serta sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Selain itu Rencana Strategis Perangkat Daerah juga harus memperhatikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN kemudian diturunkan pada RENSTRA K/L. Rencana Strategis juga harus memuat analisis yang mendalam dari masing-masing bidang tugas, permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap strategis. Kemudian Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam proses penyusunan dokumen Renstra perangkat daerah dilakukan dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder untuk mencapai tujuan Rencana Strategis perangkat daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah harus memiliki tujuan yang telah memuat sinergi yang baikk antara arah kebijakan pusat dan arah kebijakan daerah, memiliki sasaran pembangunan yang telah sesuai dengan hasil analisis dari masing-masing bidang tugas, permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis dan telah mengakomodir komitmen serta kesepakatan dari

semua stakeholder. Yang pada akhirnya meningkatkan efektifitas pembangunan di daerah khusunya pada sektor industri dan perdagangan.

**a. Visi dan Misi**

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Provinsi Lampung yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 – 2024 adalah :

"**Rakyat Lampung Berjaya"**.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan tersebut, dengan tetap memperhatikan kondisidan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. **Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.**
2. **Misi-2: Mewujudkan "*good governance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.**
3. **Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.**
4. **Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.**
5. **Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.**
6. **Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.**

Berdasarkan penjabaran singkat tentang visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Lampung tahun 2020 – 2024, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dengan **Misi Lima** yaitu : **Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.**

**b. Tujuan, Sasaran dan Indikator**

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari dari visi dan misi. Penetapan ini diharapkan

membuat rencana pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan lima tahun kedepan dapat lebih fokus pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang cepat dalam pelaksanaan, tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Tujuan pembangunan bidang Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Lampung akan difokuskan pada : **"Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi serta Menjaga Stabilitas Harga di Provinsi Lampung"**. Sasaran pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Lampung akan difokuskan pada 4 (empat) hal, yaitu:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan, adapun indikator sasarannya adalah Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%).
2. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan, adapun indikator sasarannya adalah Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%).
3. Meningkatnya nilai perdagangan Luar Negeri, dengan indikator sasarannya adalah Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US$).
4. Menjaga Stabilitas harga bahan pangan pokok penting, dengan indikator sasarannya adalah Andil inflasi bahan makanan terhadap inflasi daerah (%).

Ke- 4 (empat) sasaran berdasarkan Renstra Revisi tahun 2021, merupakan hasil asistensi dengan pihak–pihak terkait dan dipandang relevan serta sesuai untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan, mengakomodir isu–isu strategis sektor perindustrian dan perdagangan, arah kebijakan nasional pada sektor perindustrian dan perdagangan, kemudian dengan tujuan serta sasaran jangka menengah kepala daerah Provinsi Lampung. Berikut kami sajikan sasaran strategis dengan targetnya pada tabel berikut ;

**Tabel 2.1**
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Sebelum Perubahan RPJMD Provinsi Lampung**

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | | Indikator Sasaran | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan | Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (%) | 1 | Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan | Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%) | 20,15 | 20,5 | 20,85 | 21,2 | 21,56 |
| | | Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (%) | 2 | Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan | Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB (%) | 11,2 | 11,25 | 11,3 | 11,35 | 11,4 |
| | | | 3 | Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri | Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US$) | 3,5 | 3,55 | 3,6 | 3,7 | 3,8 |
| 2 | Menjaga Stabilitas harga | Laju Inflasi (%) | 4 | Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pangan Pokok Penting | Andil inflasi bahan makanan (%) | 0,10 – 0,50 | 0,10 – 0,51 | 0,10 – 0,52 | 0,10 – 0,54 | 0,10 – 0,55 |

**Tabel 2.2**
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Setelah Perubahan RPJMD Provinsi Lampung**

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran PadaTahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi | Laju pertumbuhan ekonomi (%) | 1 | Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan | Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%) | - | 5 | 5,8 | 6 | 6,3 |
| | | | 2 | Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan | Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%) | - | 5,3 | 6,3 | 6,8 | 7,2 |
| | | | 3 | Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri | Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US$) | - | 3,3 | 3,48 | 3,65 | 3,8 |
| 2 | Menjaga Stabilitas harga | Laju inflasi (%) | 4 | Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting | Andil inflasi bahan makanan (%) | - | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 2 |

## c. Indikator Kinerja Utama

**Tabel 2.3**
**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Sebelum Perubahan RPJMD Provinsi Lampung**
**Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | ALASAN | FORMULASI/CARA PENGUKURAN | SUMBER DATA | KETERANGAN/KRITERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan | Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB | % | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor Industri Pengolahan | Nilai PDRB sektor industri pengolahan dibagi total PDRB di kali 100 persen (ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku) | BPS Provinsi Lampung | Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Lampung selama 1 tahun |
| 2 | Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan | Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB | % | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor Perdagangan | Nilai PDRB sektor perdagangan dibagi total PDRB di kali 100 persen (ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku) | BPS Provinsi Lampung | Nilai PDRB Sektor Perdagangan Provinsi Lampung selama 1 tahun |
| 3 | Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri | Nilai ekspor non migas | Miliar US$ | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi | Nilai ekspor non migas selama 1 tahun | BPS Provinsi Lampung | Nilai ekspor non migas Provinsi Lampung selama 1 tahun |
| 4 | Menjaga Stabilitas harga bahan pangan pokok penting | Andil inflasi bahan makanan | %/tahun | Menjaga agar harga bahan pokok stabil | Rata-rata fluktuasi harga 19 bahan pangan pokok penting dalam satu tahun | Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung | Hasil monitoring harga di 4 pasar Bandar Lampung dan 1 pasar di Kota Metro untuk 19 jenis bahan pangan pokok penting |

**Tabel 2.4**
**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Setelah Perubahan RPJMD Provinsi Lampung**
**Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | ALASAN | FORMULASI / CARA PENGUKURAN | SUMBER DATA | KETERANGAN/KRITERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan | Persentase Pertumbuhan SektorIndustri Pengolahan | % | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor Industri Pengolahan | Nilai PDRB sektor industri pengolahan dibagi total PDRB di kali 100 persen (ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku) | BPS Provinsi Lampung | Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Lampung selama 1 tahun |
| 2 | Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan | Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan | % | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor Perdagangan | Nilai PDRB sektor perdagangan dibagi total PDRB di kali 100 persen (ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku) | BPS Provinsi Lampung | Nilai PDRB Sektor Perdagangan Provinsi Lampung selama 1 tahun |
| 3 | Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri | Nilai ekspor non migas | Miliar US$ | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi | Nilai ekspor non migas selama 1 tahun | BPS Provinsi Lampung | Nilai ekspor non migas Provinsi Lampung selama 1 tahun |
| 4 | Menjaga Stabilitas harga bahan pangan pokok penting | Andil inflasi bahan makanan | %/tahun | Menjaga agar harga bahan pokok stabil | Rata-rata fluktuasi harga 19 bahan pangan pokok penting dalam satu tahun | Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung | Hasil monitoring harga di 4 pasar Bandar Lampung dan 1 pasar di Kota Metro untuk 19 jenis bahan pangan pokok penting |

### d. Perjanjian Kinerja Perubahan 2022

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas dengan Gubernur Lampung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5**
**Perjanjian Kinerja**
**Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS | IKU / INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan | Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan | % | 5,8 |
| 2 | Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan | Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan | % | 6,3 |
| 3 | Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri | Nilai ekspor non migas | Miliar US$ | 3,48 |
| 4 | Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pangan Pokok Penting | Andil Inflasi Bahan Makanan | % | ≤ 1,5 |

**Tabel 2.6**
**Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 (APBD-P)**

| Program | | Anggaran |
|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp. 18.325.568.031 |
| 2. | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Rp. 575.000.000 |
| 3. | Program Pengembangan Ekspor | Rp. 458.000.000 |
| 4. | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen | Rp. 1.054.840.000 |
| 5. | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Rp. 1.643.500.000 |
| 6. | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Rp. 6.671.947.410 |
| 7. | Program Pengendalian Izin Usaha Industri | Rp. 225.000.000 |
| 8. | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Rp. 47.000.000 |
| | **TOTAL** | **Rp. 29.000.855.441** |

# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2021 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

## 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata

cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**
**Pencapaian Kinerja Sasaran Provinsi Lampung Tahun 2022**

| No | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA |
|---|---|---|
| 1 | Sangat Tinggi | 91% ≤ 100% |
| 2 | Tinggi | 76% ≤ 90% |
| 3 | Sedang | 66% ≤ 75% |
| 4 | Rendah | 51% ≤ 65% |
| 5 | Sangat Rendah | ≤ 50% |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019–2024 yang di tuangkan di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Nomor 015/KP/V.26/Sekret.1/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator

Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, telah ditetapkan sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja (outcomes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator

## 3.2 Capaian Tujuan dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2022

Berdasarkan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung melakukan penyesuaian tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai selama tahun 2021-2024. Rumusan perubahan tujuan, sasaran strategis beserta target yang akan dicapai, kami sajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**
**Capaian Indikator Kinerja Utama Setelah Perubahan Renstra**
**Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2022**

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Target Tujuan | Realisasi Tujuan | Capaian (%) | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi | 1 Laju pertumbuhan ekonomi (%) | 3 - 4 | 4,28 | 100 | 1 Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan | % | 5,8 | 0,47 | 8,10 |
| | | | | | | 2 Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan | % | 6,3 | 15,35 | 244 |
| | | | | | | 3 Nilai Ekspor Non Migas | Miliar US$ | 3,48 | 5,61 | 161 |
| 2 | Menjaga Stabilitas harga | 1 Laju Inflasi (%) | 3 ± 1 | 5,51 | 100 | 4 Andil Inflasi bahan makanan | % | ≤ 1,5 | 0,91 | 100 |

*Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.*

Tingkat pencapaian tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sampai dengan Desember tahun 2022 melebihi target indicator yang ditetapkan, ditunjukkan pada indikator tujuan sebagai berikut : 1. Laju pertumbuhan ekonomi dengan

persentase target tujuan 3 - 4 dan Realisasi tujuan 4,28; 2. Laju Inflasi dengan persentase tujuan 3 ± 1 dan realisasi tujuan 5,51%. Perekonomian Provinsi Lampung tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,28 (yoy), menguat dibanding tahun 2021 (c-to-c) yang tercatat tumbuh sebesar 2,77 persen.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dengan kriteria penilaian realisasi kinerja **sangat tinggi**, ditunjukkan pada 3 indikator kinerja utama, sedangkan indikator pertumbuhan sektor Industri **sangat rendah.**

Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan Misi. Penetapan ini diharapkan membuat rencana pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan lima tahun kedepan dapat lebih fokus pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang cepat dalam pelaksanaan, tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Tujuan pembangunan bidang Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Lampung yang tertera pada RPJMD akan difokuskan pada : “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi serta Menjaga Stabilitas Harga di Provinsi Lampung” dengan Sasaran Pembangunan difokuskan pada 4 (empat) hal, yaitu :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan, adapun indikator sasarannya adalah Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%).
2. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan, adapun indikator sasarannya adalah Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%).
3. Meningkatnya nilai perdagangan Luar Negeri, dengan indikator sasarannya adalah Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US$).
4. Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting, dengan indikator sasarannya adalah andil inflasi bahan makanan (%).

Ke– 4 (empat) sasaran diatas merupakan hasil asistensi dengan pihak – pihak terkait dan di pandang relevan serta sesuai untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan, mengakomodir isu – isu strategis sektor perindustrian dan perdagangan, arah kebijakan nasional pada sektor perindustrian dan perdagangan, kemudian dengan tujuan serta sasaran jangka menengah kepala daerah Provinsi Lampung. Berikut kami sajikan sasaran strategis dengan targetnya pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

| NO. | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan | Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%) | - | 5 | 5,8 | 6 | 6,3 |
| | | | Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan | Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%) | - | 5,3 | 6,3 | 6,8 | 7,2 |
| | | | Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri | Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US$) | - | 3,3 | 3,48 | 3,65 | 3,8 |
| 2 | Menjaga Stabilitas Harga | Laju Inflasi (%) | Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pangan Pokok Penting | Andil Inflasi Bahan Makanan (%) | - | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 2 |

*Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.*

Secara umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019 - 2024. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024 sebanyak 4 sasaran. Tahun 2022 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, dari 4 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4**
**Capaian Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022**

| NO. | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | CAPAIAN INDIKATOR SASARAN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan | Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%) | 5,8 | 1,58 | 27,24 |
| 2 | Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan | Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%) | 6,3 | 16,17 | 100 |
| 3 | Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri | Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US$) | 3,48 | 5,18 | 100 |
| 4 | Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pangan Pokok Penting | Andil Inflasi Bahan Makanan (%) | < 1,5 | 0,91 | 100 |

Dari sebanyak 4 Sasaran yang digambarkan pada tabel diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.5**
**Pencapaian Target Misi**

| No | Misi | Jumlah Indikator Sasaran | Tingkat Pencapaian | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Indikator Sasaran I | | Indikator Sasaran II | | Indikator Sasaran III | | Indikator Sasaran IV | |
| | | | Sangat rendah | | Sangat Tinggi | | Sangat Tinggi | | Sangat Tinggi | |
| | | | Jumlah | % capaian | Jumlah | % Capaian | Jumlah | % Capaian | Jumlah | % Capaian |
| 1 | Misi 5 | 4 | 1 | 8,10 | 1 | 243,65 | 1 | 161,20 | 1 | 100 |
| | **Jumlah** | **4** | **1** | **8,10** | **1** | **243,65** | **1** | **161,20** | **1** | **100** |

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung tahun 2019-2024 dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.6**
**Analisis Pencapaian Sasaran**

| NO. | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TAHUN DASAR | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN | | | | | | | | | | | | NASIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2024 | | | 2022 |
| | | | Realisasi | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Capaian | | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 |
| 1 | Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan | Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%) | 8,24 | - | - | - | 5 | 4,57 | 91,40 | 5,8 | 0,47 | 8,10 | 6,3 | 7,46 | | 5,64 |
| 2 | Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan | Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%) | 8,26 | - | - | - | 5,3 | 8,26 | 100 | 6,3 | 15,35 | 243,65 | 7,2 | 213,19 | | 6,55 |
| 3 | Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri | Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US$) | 2,13 | - | - | - | 3,33 | 4,83 | 100 | 3,48 | 5,61 | 161,20 | 3,8 | 147,63 | | 275,95 |
| 4 | Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pangan Pokok Penting | Andil Inflasi Bahan Makanan (%) | 0,3 | - | - | - | ≤ 1,5 | 1,1 | 100 | ≤ 1,5 | 0,91 | 100 | ≤ 2 | 100 | | 1,04 |

Berdasarkan tabel 3.6 di atas, maka analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung secara rinci adalah sebagai berikut:

## A. SASARAN 1

| SASARAN 1 | | |
|---|---|---|
| Sasaran 1 | : | Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan |
| IKU | : | Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%) |
| Satuan | : | Persentase |

| 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| - | 8,26 | - | - | -5,25 | - | 5 | 4,57 | 91,40 | 5,8 | 0,47 | 8,10 |

Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dapat dilihat dari 1 indikator yaitu "Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan" adalah sebesar 0,47% dari target sebesar 5,8% yang di rencanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 8,10%, capaian ini masih jauh dengan target yang diperjanjikan. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan masuk dalam kriteria penilaian realisasi **kinerja sangat rendah.**

Grafik 3.1
Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

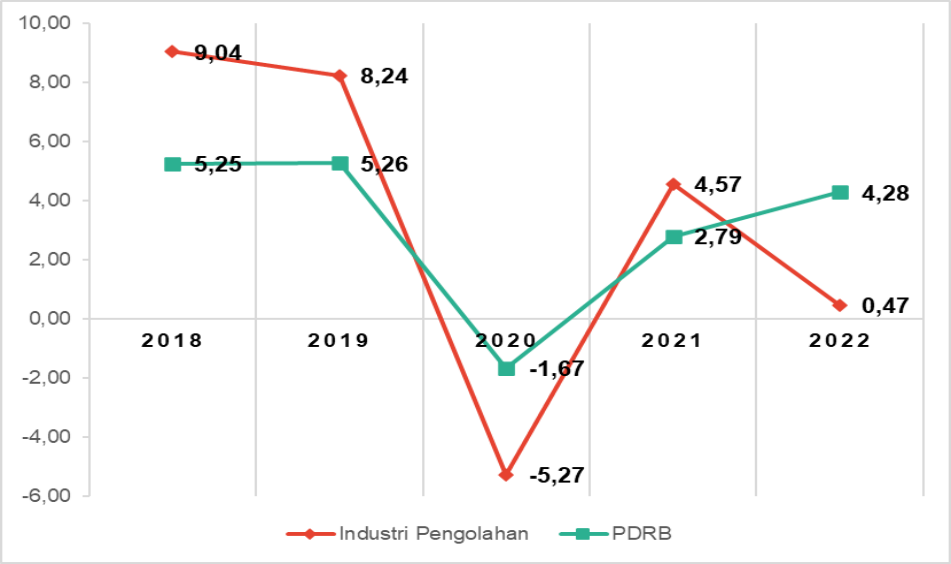


Meskipun nilai pertumbuhan sektor Industri pengolahan hanya sebesar 0,47 namun distribusi sektor Industri Pengolahan pada PDRB tetap konstan sebesar 18,55%.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan pada tahun 2022 tumbuh positif sebesar 0,47%. Walaupun capaian ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun lalu (y on y). Pertumbuhan sektor indsutri pengolahan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan nilai 9,04%; Pertumbuhan sektor industri pengolahan terendah terjadi pada tahun 2020 dengan nilai -5,27%.

| SASARAN 1 | | |
|---|---|---|
| Sasaran 1 | : | Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan |
| IKU | : | Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%) |
| Satuan | : | Persentase |
| Provinsi 2022 | | Nasional 2022 |
| Target | Capaian | Realisasi |
| 5,8 | 0,47 | 5,64 |

Tahun 2022 adalah tahun ketiga Renstra, dimana dibanding tahun sebelumnya kinerja pertumbuhan sektor industri pengolah mengalami penurunan. Apabila dibandingkan dengan data nasional yaitu realisasi 2022 sebesar 5,64 maka Pertumbuhan Sektor Industri Lampung berada jauh dibawah capaian nasional, ini berarti Provinsi Lampung terpengaruh dengan perkembangan ekonomi dunia yang mengalami ketidakpastian global pada masa pemulihan perekonomian dari efek pandemi COVID-19 dengan pertumbuhan sektor industri yang menurun dibanding tahun sebelumnya.

**Tabel 3.7**
**Permasalahan, Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat serta Solusi dalam Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan**

| No. | Masalah | Faktor Pendukung | Faktor Penghambat | Solusi | Program |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan berbahan baku produk pertanian (secara luas) untuk peningkatan nilai tambah; | 1. Sektor Industri di Provinsi Lampung itu sangat di pengaruhi oleh Industri Pertanian seperti Gula (7 pabrik), Nenas (GGPC), CPO, Pakan ternak (jagung) dan Udang.<br>2. Meningkatkan roduksi barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di Provinsi Lampung.<br>3. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan terus mendorong kegiatan produksi, sehingga terus berkembang ke luar negeri dan mendapat keuntungan lebih. | 1. Masih terbatasnya kemampuan industri kecil dan menengah terutama dalam hal penerapan standar mutu, penggunaan teknologi, pengembangan kreatifitas, inovasi dan diversifikasi produk;<br>2. Tidak tersedianya roadmap pembangunan SDM industri yang mengakibatkan belum tercapainya sinergi antara dunia pendidikan selaku *penyedia* dengan dunia industri selaku *user*; | 1. Meningkatkan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri;<br>2. Pengembangan sarana dan prasarana industri dan pengembangan sumber daya industri. | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. Mendorong IKM untuk terus berproduksi dan mengembangkan produknya serta memperluas pemasaran dan memfasilitasi IKM dengan memberi pelatihan, fasilitasi standarisasi dan bantuan peralatan serta kemasan. | 3. Hilirisasi pengolahan sumber daya alam belum optimal dilakukan di Provinsi Lampung, masih banyak sumber daya alam dari Provinsi Lampung yang dikirim keluar daerah dalam bentuk bahan mentah;<br>4. Masih banyak potensi kerjasama antara industri kecil dan menengah (IKM) dengan perusahaan besar dan BUMN yang belum difasilitasi oleh pemerintah; | | |

- **Kegiatan Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja**

Dalam menjalankan Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi target kinerja dari sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung selalu berusaha melibatkan dan menyentuh masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

**I. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**

Program ini di dukung oleh kegiatan berikut :

1. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi, dengan didukung oleh beberapa sub kegiatan prioritas sebagai berikut:
   A. Koodinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri, kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa kegiatan diantaranya :
      a. Koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk mengetahui informasi perkembangan rencana persiapan pembangunan Kawasan Industri dan Sentra IKM (Sentra Industri Kerajinan Desa Wisata Kampung Tapis).

      b. Mengikuti webinar secara virtual yang diselenggarakan oleh Ditjen KPAII Kementerian Perindustrian RI dan mengadakan rapat pembahasan tentang langkah-langkah dan persiapan yang akan ditempuh dalam mewujudkan Kawasan Industri di Provins Lampung.
      c. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau terkait Kawasan Industri Halal.

d. Mengadakan Rapat Koordinasi Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2022, diikuti oleh 60 orang peserta terdiri dari Badan/Dinas/Biro di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Narasumber berasal dari Ditjen KPAII dan Ditjen IKMA Kementerian Perindustrian RI, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

e. Menyusun Dokumen Feasibility Studies (Dokumen Kelayakan) Kawasan Industri Way Pisang Kabupaten Lampung Selatan yang bekerja sama dengan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

f. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Kampung Tapis untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan dari pelaku IKM Tapis di masing-masing Sentra Industri Kerajinan Tapis di :

| No. | Kegiatan | Tanggal | Peserta |
|---|---|---|---|
| 1. | FGD Kampung Tapis Kab. Pringsewu | 10 - 11 Nov 2022 | 50 orang |
| 2. | FGD Kampung Tapis Kab. Tanggamus | 14 - 15 Nov 2022 | 50 orang |
| 3. | FGD Kampung Tapis Kab. Pesisir Barat | 17-18 Nov 2022 | 50 orang |

g. Mengadakan Launching Desa Wisata Kampung Tapis Provinsi Lampung di Pekon Lugusari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu pada Hari Kamis tanggal 15 Desember 2022.

h. Pemberian bantuan sosial berupa papan nama sentra industri, papan penunjuk arah, dan etalase masing-masing 1 unit untuk 3 Sentra Industri Desa Wisata Kampung Tapis :
   - Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat
   - Pekon Lugu Sari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu
   - Pekon Sumber Mulyo/Sailing Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus.

B. Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, berikut beberapa pelaksanaan kegiatan pendukung sub kegiatan ini diantaranya adalah :

1. Pengawasan terhadap penyebaran minyak goreng curah bersubsidi terhadap 4 perusahanaan dan koordinasi terhadap produsen dan distributor di Provinsi Lampung. Sedangkan untuk pengawasan kepatuhan terhadap industri besar yang menjadi kewenangan provinsi telah dilakukan pengawasan terhadap 6 perusahaan di wilayah Provinsi Lampung.

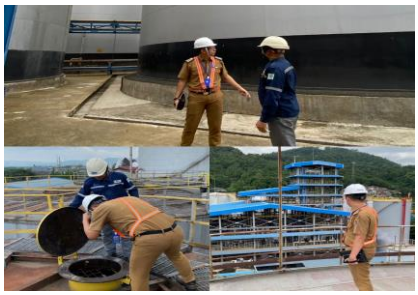

2. Melaksanakan kegiatan link and match antara industri dengan Lembaga Pendidikan Vokasi (SMKN 8 Bandar Lampung), adapun maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu untuk membangun keterlibatan dunia industri pada Pendidikan vokasi SMK guna melahirkan SDM vokasi yang unggul dan hebat di Provinsi Lampung.

- Mengikuti pameran Indonesian Premium Coofee di Lapangan Banteng Jakarta pada tanggal 24 s.d. 26 Juni 2022.

- Mengikuti pameran Inacraf di DCC Senayan Jakarta pada tanggal 23 s.d. 27 Maret 2022.

C. Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dan sub kegiatan ini didukung oleh kegiatan berupa :

- Sosialiasi Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (PTKDN) bagi Produk IKM Provinsi Lampung, yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2022 di Hotel Horison Bandar Lampung.

- Bimtek Penerapan Sistem Managemen Mutu ISO 9001 dan Fasilitasi Sertifikasi HACCP IKM Makanan, diselenggarakan pada tanggal 18-20 Juli 2022 di Hotel Kurnia 2 Bandar Lampung.

- Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), diselenggarakan pada tanggal 12 April 2022 di Pusiban Kantor Gubernur Lampung.

D. Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, Sub kegiatan didukung oleh beberapa kegiatan , diantaranya :

✓ **Bimtek Pirt (Pangan Industri Rumah Tangga)** yang diselenggarakan di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 24 Maret 2022 dan di Kabupaten Mesuji pada tanggal 29 Maret 2022 dengan jumlah seperta 30 dari setiap kabupaten.

- ✓ **Bimtek Diversifikasi Turunan Tapis (Homedekor)** yang dilaksanakan pada tanggal 30-31 Agustus 2022 di Hotel Yuna Bandar Lampung. Dengan jumlah peserta 50 UKM dari Kota Bandar Lampung, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Timur.

- ✓ **Bimtek Dispersifikasi Pembuatan Tepung Pisang** yang dilaksanakan pada tanggal 5 - 6 September 2022 di Hotel Yuna Bandar Lampung. Dengan jumlah peserta 50 UKM dari Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Timur.

- ✓ **Kurasi Produk Kopi Lampung** dilaksanakan mulai dari tanggal 16 September – 3 November 2022 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, dilaksanakan untuk menentukan 10 produk Kopi terbaik.

- ✓ **Lomba Tiktok Barista Lampung** dilaksanakan pada tanggal 19 - 30 September 2022 yang mana pelaksanaannya tersebar di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- ✓ **Seminar / Talkshow Kopi, Coaching Clinic Barista, Lomba Tata Hidang Makanan Berbahan Kopi** dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2022 di Gedung Graha Wangsa, Bandar Lampung.

- ✓ **Pameran Kopi Lampung (Coffee Lampung Begawi)** dilaksanakan di Gedung Sarinah Thamrin, Jakarta pada tanggal 8 s.d 9 Oktober 2022, dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut :
  1. Ngobrol Kopi (NGOPI) Robusta Lampung, dilaksanakan di pelataran Gedung Sarinah Thamrin, Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2022 pukul 19.00 WIB – 21.00 WIB.

  2. Robusta Lampung *Car free Day*, dilaksanakan pada 9 Oktober 2022 pukul 07.00 – 09.00 WIB

3. Bedah Resep Kekhasan Robusta Lampung oleh Juara Dunia Barista yang dilaksankan pada tanggal 9 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB – 12.00 WIB.

4. Temu Bisnis Kopi, dilaksanakan pada 9 Oktober 2022 pukul 13.00 – 16.00 WIB.

✓ **Bimtek Peningkatan SDM IKM Hasil Tembakau.**

Dilaksanakan pada 23 November – 25 November 2022 di Hotel Arnes, Bandar Lampung dengan jumlah peserta 20 orang.

✓ **Hibah Alat Ukur Kualitas Tembakau sebagai Bahan Baku Rokok.**

Hibah alat diberikan kepada IKM hasil tembakau di Kabupaten lampung Timur. Diharapkan melalui hibah tersebut dapat meningkatkan kualitas serta efesiensi dalam memilih tembakau sebagai bahan baku rokok.

- Pada UPTD Kemasan telah melaksanakan Sosialisasi bantuan kemesan terhadap 20 IKM dari Kabupaten/Kota yang belum memiliki kemasan

yang sesuai dan bagus. Pelaksanaan pada tanggal 23 – 27 Mei 2022 di Kantor UPTD – IPOK Bandar Lampung, konsultasi dilakukan oleh 5 IKM setiap jam kerja.

E. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri, sub kegiatan ini telah melakukan Pemantauan Progress RIPK dan Sosialisasi Registrasi IKM ke aplikasi SiKam dengan Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten TBB, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Utara.

## II. Program Pengendalian Izin Usaha Industri.

Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi. Adapun sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:
   a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sisten Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik.

      Sub kegiatan ini berupa kegiatan yang mendorong perusahaan untuk memproses izin usaha sesuai dengan PP No.5 tahun 2021, guna falisitasi perusahaan industri perolehan izin usaha industri yang terintegritas secara elektronik. Adapun perusahaan yg sudah terfasilitasi terhadap permohonannya diantaranya 9 perusahaan dari Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung.

   b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi. Koordinasi lingkup wasdal dalam bentuk pengawasan perizinan pada 21 perusahaan di wilayah Provinsi Lampung, serta pembuatan aplikasi web untuk data base industri.

**III. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.**

Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Adapun kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:
   a. Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi Melalui SIINAS,
   b. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi Dalam Penyampaian Data ke SIINas.

## B. SASARAN 2

| SASARAN 2 | | |
|---|---|---|
| Sasaran 2 | : | Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan |
| IKU | : | Pertumbuhan Sektor Perdagangan |
| Satuan | : | Persentase |

| 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| - | 7,20 | - | - | -6,64 | - | 5,30 | 8,26 | 155,85 | 6,3 | 15,35 | 243,65 |

Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan dapat dilihat dari 1 indikator yaitu "Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan" dengan capaian kinerja pada tahun 2022 adalah sebesar 15,35% dari target sebesar 6,3% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 243,65% atau tercapai 100%, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2022 adalah tahun ketiga Renstra atau tahun kedua setelah perubahan Renstra. Capaian kinerja bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya bahwa capaian meningkat. Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan masuk dalam kriteria penilaian **realisasi kinerja sangat tinggi**.

Pertumbuhan sektor perdagangan pada tahun 2022 mencatatkan nilai sebesar 15,35%. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu (y on y) dan tertinggi selama 5 tahun terakhir. Pertumbuhan terendah sektor perdagangan terjadi pada tahun 2020 dengan nilai -6,64%.

Grafik 3.2
Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

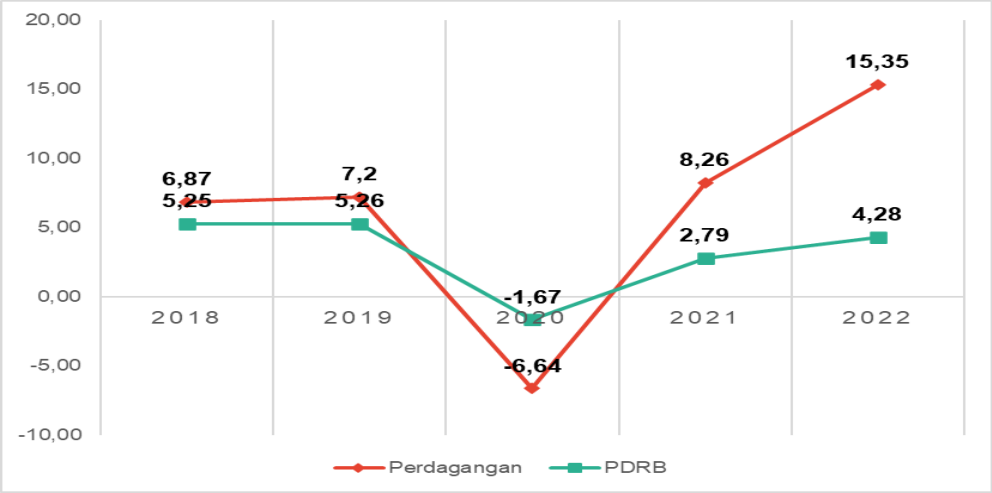


Persentase pertumbuhan sector perdagangan tahun 2022 melampaui pertumbuhan sector perdagangan tahun 2018-2019 sebelum Pandemo covid 19, hal ini menunjukkan bahwa perdagangan di provinsi Lampung telah menggeliat setelah terpuruk pada masa Pandemi.

| SASARAN 2 | | |
|---|---|---|
| Sasaran 2 | : | Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan |
| IKU | : | Pertumbuhan Sektor Perdagangan |
| Satuan | : | Persentase |
| 2024 | | Nasional |
| Target | Capaian | Realisasi 2022 |
| 7,2 | 213,19 | 6,55 |

Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan pada indikator “Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan” capaian kinerja tahun 2022 dibanding dengan target kinerja akhir Renstra di tahun 2024 dengan capaian kinerja sebesar 213,19% dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 7,2%. Capaian tersebut merupakan persentase capaian kinerjanya kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi. Capaian kinerja Pertumbuhan sector perdagangan Provinsi Lampung sebesar 15,35% dibandingkan dengan pertumbuhan sector perdagangan Nasional cukup tinggi dimana Nasional hanya sebesar 6,55%.

**Tabel 3.8**
**Permasalahan, Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat serta Solusi**
**Dalam Pertumbuhan Sektor Perdagangan**

| No. | Masalah | Faktor Pendukung | Faktor Penghambat | Solusi | Program |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. Keterbatasan data dan informasi tentang perdagangan antar daerah, serta akses pasar dalam dan luar negeri untuk produk unggulan daerah;<br>2. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal, melalui mekanisme pengaduan dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen. | 1. Di sisi Lapangan Usaha (LU), Ekonomi Provinsi Lampung 2022 dibanding periode yang sama tahun 2021 menguat dibanding triwulan sebelumnya. Pertumbuhan positif terjadi pada sebagian besar lapangan usaha terutama Jasa Lainnya, Transportasi dan Pergudangan, serta Jasa Perusahaan yang tumbuh cukup tinggi.<br>2. Lapangan usaha Perdagangan Besar- | 1. Melambatnya pertumbuhan LU perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sejalan dengan kinerja konsumsi rumah tangga Provinsi Lampung yang juga tercatat melambat yang di pengaruhi oleh terbatasnya mobilitas masyarakat dan perekonomian yang belum stabil dan perekonomian global yang mengalami perlambatan. | 1. Meningkatkan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi pada Lapangan Usaha Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor.<br>2. Pengembangan sarana dan prasarana Lapangan Usaha Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor. dan pengembangan sumber daya Lapangan Usaha Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor. | 1. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.<br>2. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor tumbuh 17,51 persen, diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 14,85 persen. | | | |

**Kegiatan yang mendukung Pencaiapan Indikator kinerja**

Program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian realisasi target kinerja dari sasaran strategis persentase pertumbuhan sektor perdagangan yang langsung menyentuh masyarakat berupa:

**I. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.**

Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri, adapun kegiatan ini didukung oleh beberapa sub kegiatan prioritas pendukung sebagai berikut:
   a. Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi, sub kegiatan ini didukung oleh beberapa event diantaranya :
      - Koordinasi pada kementerian Perdagangan RI dalam rangka pengambilan bantuan fasilitasi perdagangan untuk mendukung sarana promosi IKM/UKM di Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Lampung.
      - Event Bazar Rebo dilaksanakan tanggal 24 Agustus 2022 di Lapangan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

      - Bazar Kuliner/Produk UKM/IKM Lampung, 06 s/d 07 Desember 2022 bertempat di Halaman Kantor Bupati Kabupaten Lampung Utara.

- Bazar Kuliner/Produk UKM/IKM Lampung, 20 Desember 2022 dimulai pukul 08.00 WIB s/d selesai bertempat di Lapangan Kelurahan Desa Sribawono Kecamatan Sribawono Kabupaten Lampung Timur.

- Bazar Kuliner/Produk UKM/IKM Lampung, 27 Oktober 2022 di Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Mesuji.

➢ Semarak IKM atau apresiasi IKM/UKM yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2022 dimulai pukul 08.00 WIB s/d selesai bertempat di Lapangan Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Way Halim Bandar Lampung (Halaman depan Gedung Sumpah Pemuda), dengan rangkain acara sebagai berikut :

1. Launching Galery Sikam
2. Lomba masakan olahan terasi
3. Live cooking bersama Chef Rissana Ica
4. Bazar IKM/UKM
5. Pasar Murah Bahan Kebutuhan Pokok
6. Apresiasi IKM/UKM
7. Penyerahan bantuan

2. Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, adapun rincian kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:
   a. Fasilitas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi, dilaksanakan berupa Sosialisasi fasilitasi merk dagang kepada 50 UKM yang diselenggarakan pada tanggal 5 Agustus 2022 di Hotel Yuna Bandar Lampung bekerjasama dengan Kemhum dan HAM.

   b. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan, pada Sub kegiatan ini telah dilaksanakan kajian dua (2) dokumen rantai pasokan distribusi komoditi cabe merah dan Rantai Pasok distribusi lada, pada tahun 2022.

## II. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di seluruh Daerah Kabupaten/Kota,

   Adapun dukungan beberapa sub kegiatan prioritas pada kegiatan ini sebagai berikut:

   a. Pembedayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen, dengan Sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) pada tanggal 26 Agustus 2022 di Lapangan Korpri Komplek Perkantoran Gubernur Lampung.

2. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, adapun sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:

   a. Verifikasi Mutu Produk, Sub kegiatan ini telah memberikan fasilitasi uji mutu barang terhadap 30 perusahaan se-Provinsi Lampung,

   b. Pengembangan Layanan Pengujian, Sub kegiatan meliputi beberapa kegiatan diantaranya :

      - Pengambilan sampel untuk uji laboratorium komoditi kopi, lada, kakau dan beras.
      - Pembelian beberapa bahan kimia sebagai pendukung kegiatan uji laboratorium guna peningkatan mutu.

- Kajian Balai Layanan Usaha Daerah (BLUD) pada bulan agustus s.d. September 2022.
- Penyusunan Pergub tentang Standarisasi Kualitas Kopi Bubuk Lampung.

c. Pengembangan Layanan Sertifikasi, sub kegiatan ini dilaksanakan dengan melaksanakan uji laboratorium komoditi kopi, lada, kakau dan beras serta telah menerbitkan sertifikat uji laboratorium sebanyak 1.157 sertifkat.

d. Pengembangan Layanan Kalibrasi, sub kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2022 berupa :

- ✓ Sertifikasi Kalibrasi alat penguji laboratorium komoditi sebanyak 12 alat.
- ✓ Studitiru ke BPSMB Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Direktorat STANDALITU Kemendag RI dan BPSMB Provinsi Jambi serta Laboratorium Cita Rasa Puslitkoka Jember dalam rangka pengembangan ruang lingkup layanan kalibrasi.

3. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa diseluruh Daerah Kabupaten/Kota, adapun rincian dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:
   A. Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen, dengan sub kegiatan ini telah dilaksanakan kegiatan berupa pengawasan merk SNI terhadap barang elektronik dan mendapatkan total 2.016 temuan dari Kota Metro, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten TBB, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lmapung Selatan dan Kota Bandar Lampung.

   B. Fasilitasi Penanganan Terhadap Pelanggaran atas Ketentuan Perlindungan Konsumen, Sub kegiatan ini telah dilaksanakan berupa koordinasi terkait penanganan pelanggaran yang terjadi atau hasil pengawasan ataupun berdasarkan laporan.

## C. SASARAN 3

| SASARAN 3 | |
|---|---|
| Sasaran 3 | Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri |
| IKU | Nilai Ekspor Non Migas |
| Satuan | Miliar US$ |

| 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Capaian | Realisasi |
| - | 2,13 | - | 3,50 | 3,14 | 89,71 | 3,33 | 4,83 | 145,04 | 3,48 | 5,61 | 161,20 |

Sasaran Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri dapat dilihat dari 1 indikator yaitu "Nilai Ekspor Non Migas" dengan capaian kinerja pada tahun 2022 adalah sebesar 5,61 Miliar US$ dari target sebesar 3,48 Miliar US$ yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerja adalah 161,20% atau tercapai 100%, capain ini menunjukkan penilaian **realisasi kinerja sangat tinggi** pada capaian kinerja.

Grafik 3.3
Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas

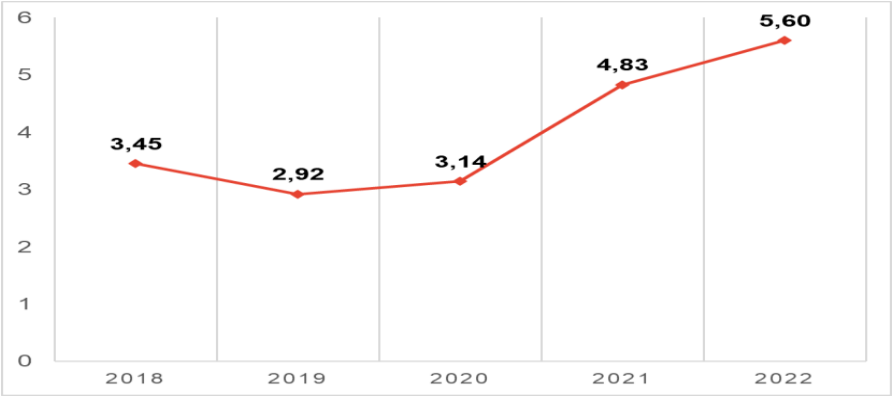


Nilai ekspor non migas Provinsi Lampung pada tahun 2022 mencatatkan nilai sebesar 5,60 miliar US$. Kinerja baik ekspor non migas terakhir didukung oleh meningkatnya harga komoditas di pasar global dan membaiknya perekonomian negara – negara tujuan ekspor Provinsi Lampung. Nilai ekspor non migas terendah terjadi pada tahun 2019 dengan nilai 2,92 miliar US$.

Tahun 2022 adalah tahun ketiga Renstra sehingga perbandingan capain kinerja untuk indikator Nilai Ekspor Non Migas tahun 2021 yaitu 161,20%. Hal ini berarti nilai ekspor non migas dari tahun 2021-2022 meningkat sebesar 53,82%.

| SASARAN 3 | | |
|---|---|---|
| Sasaran 3 | : | Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri |
| IKU | : | Nilai Ekspor Non Migas |
| Satuan | : | Miliar US$ |
| 2024 | | Nasional |
| Target | Capaian | Realisasi 2022 |
| 3,8 | 147,63 | 275,95 |

"Nilai Ekspor Non Migas" dengan capaian kinerja pada tahun 2022 adalah sebesar 5,61 Miliar US$ dibanding dengan capaian akhir Renstra tahun 2024 yaitu dengan capaian sebesar 147,63 % dari target sebesar 3,8 Miliar US$ sehingga persentase capain ini

menunjukkan penilaian realisasi kinerja sangat tinggi pada capaian kinerja. Walaupun Nilai Ekspor Non migas Provinsi Lampung sebesar 5,61 Miliar US$ namun dibanding dengan nilai Ekspor Nasional sebesar 275,95 Ekspor Lampung memberi kontribusi sebesar 2,03% dari total ekspor Nasional.

**Tabel 3.9**
**Permasalahan, Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat serta Solusi**
**Dalam Perdagangan Luar Negeri**

| No. | Masalah | Faktor Pendukung | Faktor Penghambat | Solusi | Program |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. Pengembangan dan diversifikasi produk ekspor potensial belum optimal;<br>2. Keterbatasan data dan informasi tentang perdagangan luar negeri, serta akses pasar luar negeri untuk produk unggulan daerah; | 1. Pemulihan ekonomi Negara mitra dagang utama Provinsi Lampung meningkatkan permintaan ekspor untuk industri pengolahan makanan cukup signifikan dari Amerika, Eropa, Asia Timur dan Arab Saudi.<br>2. Peningkatan kinerja ekspor luar negeri di Provinsi Lampung bersumber dari peningkatan volume ekspor Batubara, CPO, Lada dan Kopi. | 1. Masih rendahnya informasi serta perkembangan pasar pada negara tujuan ekspor yang diperoleh para eksportir di dalam daerah.<br>2. Masih dominannya komoditas-komoditas unggulan yang berkontribusi pada nilai ekspor Provinsi Lampung.<br>3. Masih kurangnya sinergitas dan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam upaya peningkatan ekspor Provinsi Lampung. | 1. Meningkatkan pengetahuan eksportir, kerjasama, dan pengawasan terhadap eksportir.<br>2. Mengembangan sarana dan prasarana eksportir. | Program Pengembangan Ekspor |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Peningkatan harga CPO Internasional mendorong kinerja ekspor lemak dan minyak hewan/nabati meningkat tajam. | | | |

Berikut kami sajikan data ekspor non migas Provinsi Lampung hingga akhir tahun 2022 beserta perbandingan dengan nilai ekspor non migas tahun 2018 sebagai berikut :

**Tabel 3.10**
**Data Ekspor Non Migas Provinsi Lampung Tahun 2018-2022**

| No | Ekspor | 2018 (Juta US$) | 2019 (Juta US$) | 2020 (Juta US$) | 2021 (Juta US$) | 2022 (Juta US$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Non Migas | 3,437.4 | 2,929.2 | 3,144.7 | 4,837.1 | 5,606.26 |

*Sumber : BPS Provinsi Lampung (diolah)*

Berdasarkan tabel 3.7, nilai ekspor non migas sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar 5,606.26 Juta US$. Nilai ini adsalah nilai tertinggi selama kurun waktu lima tahun, ekspor terendah terjadi pada tahun 2019 dengan nilai sebesar 2,929.2 juta US$. Dari Tabel 3.10 di atas, terlihat bahwa nilai ekspor Provinsi Lampung bergerak secara fluktuatif dari tahun 2018-2022.

**Tabel 3.11**
**Ekspor Berdasarkan Komoditi Unggulan Provinsi Lampung Tahun 2021-2022**

| NO | KOMODITI | 2021 | 2022 | % PERUBAHAN |
|---|---|---|---|---|
| | | NILAI (USD) | NILAI (USD) | |
| 1 | BATUBARA | 790.530.079 | 1.253.049.205 | 58,51 |
| 2 | CPO DAN TURUNAN SAWIT | 1.668.903.251 | 1.158.936.379 | - 30,56 |
| 3 | KOPI ROBUSTA | 393.714.791 | 536.723.881 | 36,32 |
| 4 | NANAS / OLAHAN | 350.858.525 | 339.588.560 | - 3,21 |
| 5 | UDANG | 242.928.547 | 221.474.053 | - 8,83 |
| 6 | PULP | 206.531.221 | 240.946.095 | 16,66 |
| 7 | KARET SIR | 145.054.949 | 89.337.700 | - 38,41 |
| 8 | MOLASES | 78.046.995 | 67.814.762 | - 13,11 |
| 9 | LADA HITAM | 44.195.332 | 48.631.817 | 10,04 |
| 10 | KELAPA / OLAHAN | 4.731.747 | 14.172.758 | 199,52 |
| | LAINNYA | 911.594.978 | 1.635.573.649 | 79,42 |
| TOTAL | | 4.837.090.415 | 5.606.248.860 | 15,90 |

*Sumber : BPS Provinsi Lampung*

Kinerja sektor eksternal tercatat positif, didorong oleh pertumbuhan net ekspor yang tinggi pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 15,90 terhadap nilai ekspor tahun 2021. Pada tahun 2022, ekspor tercatat sebesar 5,606 Milyar US$, meningkat cukup significant jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2021 sebesar 4,837 Milyar US$. Seiring pemulihan kondisi perekonomian mitra dagang utama Lampung, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok yang merupakan tujuan utama ekspor.

Apabila dilihat pada Tabel 3.8 Pada Tahun 2022, ekspor Karet merupakan komoditi yang mengalami penurunan nilai ekspor tertinggi pada tahun 2022 jika dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 38,41%.

**Tabel 3.12**
**Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Provinsi Lampung Tahun 2021-2022**

| NEGARA TUJUAN | 2021 | 2022 | Perbandingan Nilai |
|---|---|---|---|
| | NILAI (USD) | NILAI (USD) | |
| UNITED STATES | 832.454.731,3 | 847.162.591,8 | 1,77 |
| INDIA | 144.958.070,6 | 717.798.245,6 | 395,18 |
| CHINA | 925.265.460,0 | 622.921.037,5 | -32,68 |
| ITALY | 414.018.940,2 | 601.237.601,2 | 45,22 |
| PAKISTAN | 359.915.792,3 | 388.123.463,8 | 7,84 |
| NETHERLANDS | 283.186.683,2 | 381.941.938,7 | 34,87 |
| KOREA, REPUBLIC OF | 139.545.564,8 | 286.473.654,2 | 105,29 |
| JAPAN | 194.700.192,5 | 284.502.195,4 | 46,12 |
| NEW ZEALAND | 136.910.086,0 | 173.347.046,0 | 26,61 |
| PHILIPPINES | 248.345.512,2 | 140.162.954,5 | -43,56 |
| LAINNYA | 1.157.789.382 | 1.162.578.131 | 0,41 |
| **TOTAL** | **4.837.090.415** | **5.606.248.860** | **15,90** |

*Sumber : BPS Provinsi Lampung*

Pada Tahun 2022 Amerika merupakan negara tujuan ekspor yang menyumbang nilai ekpor terbesar dengan nilai sebesar 847.162.591,8 US$ atau sekitar 15,11% dari total nilai ekspor Provinsi Lampung. Nilai ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021, dimana nilai ekspor ke Amerika Serikat pada tahun 2021 sebesar 832.454.731 US$. Namun India merupakan negara tujuan ekspor tertinggi pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh 395%.

Tren kenaikan nilai ekspor non migas yang terjadi di tingkat nasional terlihat juga di Provinsi Lampung, walaupun kenaikan nilai ekspor non migas Lampung masih di bawah nilai ekspor Nasional yaitu 15,90%. Berikut kami sajikan perbandingan ekspor non migas Provinsi Lampung dengan nilai ekspor non migas nasional sebagai berikut :

**Tabel 3.13**
**Perbandingan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi Lampung dengan Nilai Ekspor Non Migas Nasional**

| No | Keterangan | Tahun | | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | |
| 1 | Nasional | 219,246 Juta US$ | 275,960 Juta US$ | 25,80 % |
| 2 | Provinsi Lampung | 4,837 Juta US$ | 5,606 Juta US$ | 15,90 % |

Dari tabel 3.10 diatas terlihat bahwa nilai ekspor di tingkat nasional mengalami kenaikan sebesar 25,80%, dari 219,246 juta US$ pada tahun 2021 naik menjadi 275,960 juta US$ pada tahun 2022. Kondisi ini sama dengan kinerja ekspor Provinsi Lampung dimana nilai ekspor non migas Provinsi Lampung naik sebesar 15,90 %, dari 4,837 Juta US$ menjadi 5,606 Juta US$. Tahun 2022 adalah tahun ketiga renstra, capaian kinerja indikator 1 "Nilai Ekspor Non Migas" tahun ini adalah sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan target tahun 2021.

- **Kegiatan Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja**

Dalam menjalankan Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi target kinerja dari sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung selalu berusaha melibatkan dan menyentuh masyarakat, salah satu tupoksi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah pelaksanaan tugas di bidang perdagangan luar negeri. Sasaran kinerja ini berkaitan dengan upaya meningkatnya nilai perdagangan luar negeri dengan indikator kinerja dari sasaran strategis adalah nilai ekspor non migas. Sasaran ini berkaitan dengan upaya meningkatkan kinerja ekspor serta meningkatkan kualitas barang ekspor agar dapat bersaing di pasar Internasional agar berkonstribusi lebih besar bagi perekonomian Provinsi Lampung.

Target kinerja dalam nilai ekspor non migas senilai 3,48 Milayr US$ dan pencapaian realisasi kinerja sebesar 5,61 Milyar US$. Hasil ini menunjukan bahwa progres capaian dari indikator pada tahun 2022 adalah 100%, ini menunjukan bahwa nilai ekspor non migas telah melebihi dari target yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Penyebab terjadinya nilai ekspor dari target dikarenakan banyakan permintaan komoditi dari beberapa negara tujuan ekspor Provinsi Lampung usai masa pandemi Covid-19.

Adapun program yang menyentuh masyarakat secara langsung adalah Program Pengembangan Ekspor, adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut :

1. Penyelengaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam Provinsi, Adapun rincian sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:

*a.* Peningkatan Citra Produk Ekspor, Sub kegiatan ini berupa 2 event diantaranya:

- ✓ Pameran Indonesia Tourism & Trade Investment Expo "Bali Prioritas " dilaksanakan di Level 21 mall Denpasar Provinsi Bali.

- ✓ Kegiatan Pameran "Gelar Produk Unggulan Khas Daerah Pariwisata Dan Investasi Tahun 2022", dilaksanakan di Cihampelas Walk Bandung pada tanggal 17 s/d 20 November 2022.

b. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor, Sub kegiatan ini telah melaksanakan kegiatan diantaranya :

- FGD terkait ongkos fredht pengapalan dan container, diselenggarakan pada tanggal 11 oktober 2022 di Hotel Grean Praba Bandar Lampung.

- FGD kebijakan ekspor produk CEO dalam upaya stabilitasi Minyak Goreng, diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 2022 di Hotel Yuna Bandar Lampung.

- Pendampingan dan Pelatihan bagi UKM untuk menembus pasar ekspor (CPNE), diselenggarakan pada tanggal 23 – 25 Agustus 2022 di Hotel Yuna Bandar Lampung.

## D. SASARAN 4

| SASARAN 4 | |
|---|---|
| Sasaran 4 | Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting |
| IKU | Andil Inflasi Bahan Makanan |
| Satuan | Persentase |

| 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Capaian | Realisasi |
| - | 2,13 | - | - | - | - | ≤1,5 | 1,1 | 100 | ≤1,5 | 0,91 | 100 |

Sasaran “Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting” dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu “Andil inflasi Bahan Makanan" adalah sebesar 0,91 % dari target sebesar kisaran ≤1,5 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2022 adalah tahun kedua perubahan target Renstra, Indikator Andil inflasi Bahan Makanan" masuk dalam kriteria penilaian **realisasi kinerja sangat tinggi**.

Grafik 3.4
Andil Inflasi Bahan Makanan

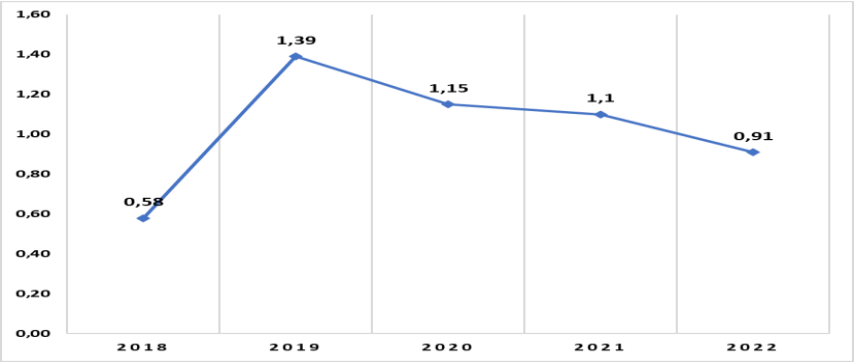


Pada tahun 2022, nilai andil inflasi bahan makanan terhadap inflasi sebesar 0,91%. Nilai ini lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Hal ini menunjukan bahwa pergerakan harga pada bahan makanan masih terjaga. Walaupun terjadi beberapi kali lonjakan harga bahan pokok. Andil inflasi bahan makanan terhadap inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 1,39%. Andil inflasi bahan makanan terhadap inflasi terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 0,58%

| SASARAN 4 | | |
|---|---|---|
| Sasaran 4 | : | Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting |
| IKU | : | Andil Inflasi Bahan Makanan |
| Satuan | : | Persentase |
| 2024 | | Nasional |
| Target | Capaian | Realisasi 2022 |
| ≤ 2 | 100 | 1,04 |

Capaian Indikator "Andil inflasi Bahan Makanan" tahun 2022 terhadap target indicator akhir Rentra tahun 2024 sebesar 0,91 % dari target sebesar kisaran ≤2 terealiasi atau masih terjaga di bawah atau sama dengan 2 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, Capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Nilai andil Inflasi bahan makanan tingkat Nasional sebesar 1,04% di banding dengan andil inflasi bahan makanan Provinsi Lampung masih terjaga yaitu di bawah 1,5% dari target. Sehingga indicator ini baik capaian provinsi maupun Nasional adalah 100% dan masuk dalam kriteria penilaian **realisasi kinerja sangat tinggi.**

**Tabel 3.14**
**Permasalahan, Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat serta Solusi**
**Dalam Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pangan Pokok Penting**

| No. | Masalah | Faktor Pendukung | Faktor Penghambat | Solusi | Program |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. Fluktuasi harga komoditi pertanian, terutama bahan pangan pokok masih tinggi, terutama menurunnya harga pada saat panen raya.<br>2. Pentingnya peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait guna menjaga pergerakan harga bahan pangan pokok dan barang penting; | Kelompok makanan, minuman dan tembakau terpantau mengalami penurunan tekanan inflasi. Disisi lain, tekanan inflasi pada sub kelompok makanan masih tertahan oleh beberapa komoditas yang mengalami deflasi seperti komoditas beras, telur ayam ras dan petai. | Pada triwulan III 2022, kelompok makanan, minuman dan tembakau merupakan kelompok penyumbang inflasi dengan andil terbesar yaitu 1,08% (yoy). Komoditas utama yang menyumbang tekanan inflasi pada sub kelompok tersebut antara lain minyak goreng (0,24%), tempe (0,14%) dan ikan kembung (0,12%). | 1. Meningkatkan pengetahuan, kerjasama, dan pengawasan terhadap andil inflasi terbesar, sehingga dapat menurunkan tekanan terhadap andil inflasi.<br>2. Mengembangan sarana dan prasarana eksportir. | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting |

- **Kegiatan Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja**

Program yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang langsung menyentuh masyarakat adalah sebagai berikut:

**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**

Program ini bertujuan untuk menunjang perkembangan sektor perdagangan di Provinsi Lampung. Adapun kegiatan program ini yang mendukung indikator kinerja ini antara lain:

1. Pengendalian harga informasi ketersedian stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan, dengan pagu anggaran Rp. 375.000.000,-. Adapun rincian anggaran dari sub kegiatan pendukung kegiatan ini sebagai berikut:
   a. Pemantauan Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran Rp. 75.000.00,-. Sub kegiatan ini melakukan pemantauan harga barang pokok pada 3 pasar di Bandar Lampung pada jenis komoditi seperti bawang putih, bawang merah, cabe merah, cabe rawit, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur dan gula. Pemantauan harga dilaksanakan pada setiap hari kerja. Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000,- (100%).

   b. Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisai Harga Pangan Pokok Yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 Daerah Provinsi, dengan pagu anggaran Rp. 300.000.000,-. Sub kegiatan ini telah melaksanakan pasar murah pada 3 (tiga) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kota Metro. Selain adanya kegiatan penetrasi pasar di Kota Bandar Lampung juga terdapat kegiatan Bazar Rebo dengan subsidi bahan pokok berupa minyak goreng, telur dan cabai yang pelaksanaanya setiap hari rabu di lapangan kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 297.862.000,- (100%).

2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi Dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsdidi di Wilayah Kerjanya, dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,-. Adapun rincian anggaran dari sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini adalah Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi, dengan pagu anggaran Rp. 200.000.00,- Realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 191.740.000,- (100%). Sub kegiatan pendukung diantaranya yaitu :

- Melakukan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi pada bulan November 2022 di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tubaba dan Kota Bandar Lampung.

- Sosialisasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi dan Peredaran Pupuk Palsu di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tulang Bawang pada bulan Desember 2022.

## 3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

### A. Rencana Strategis Tahun 2019-2024

Secara umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024.

**Tabel 3.15**
**Pencapaian Target Misi Berdasarkan Permendagri 86/2017**

| No. | Misi | Jumlah Indikator Sasaran | Tingkat Pencapaian | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sangat Tinggi | | Tinggi | | Sedang | | Rendah | | Sangat Rendah | |
| | | | Realisasi | % | Realisasi | % | Realisasi | % | Realisasi | % | Realisasi | % |
| 1 | 5 | 1 | | | | | | | | | 0,47 | 8,10 |
| | | 1 | 15,35 | 243,65 | | | | | | | | |
| | | 1 | 5,61 | 161,20 | | | | | | | | |
| | | 1 | 0,91 | 100 | | | | | | | | |

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung memiliki 4 (empat) indikator sasaran yang terdapat dalam 1 (satu) Misi Gubernur periode 2019-2024. Tingkat pencapaian target sasaran dalam Perubahan Renstra 2019-2024 Misi ke-5 yaitu 3 indikator sasaran (sektor perdagangan) berkinerja S**angat Tinggi**, sedangkan 1 indikator sasaran (sektor perindustrian) berkinerja S**angat Rendah**.

## 3.4 Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan TA 2022

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung pada tahun 2022 memiliki pagu anggaran berdasarkan APBD-P Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 29.000.855.441,- yang terdiri dari yang terdiri 8 (delapan) program pembangunan 18 (delapan belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub-kegiatan. Seperti terlihat pada Tabel berikut;

**Tabel 3.16**
**Program dan Pagu Anggaran 2022**

| No. | Misi | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Misi ke-5 dari RPJMD yaitu : “Membangun kekuatan ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan Yang Seimbang Dengan Wilayah Perkotaan” | 29.000.855.441,- | 27.567.970.423,- | 95,06 |

*Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.*

Pada Tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki pagu anggaran sebesar Rp 29.000.855.441,- dengan Realisasi anggaran Rp 27.567.970.423,- atau sebesar 95,06%. Tabel 3.11 menunjukkan sudah tercapainya efisiensi dan efektivitas capaian kinerja terhadap capaian anggaran dengan rata-rata 4 (empat) IKU capaiannya sebesar 132,87% sedangkan kinerja anggaran yang dihasilkan mendorong efisiensi sumber daya sebesar 4,94% atau setara Rp 1.432.885.018,- dengan melihat perbandingan capaian kinerja terhadap capaian anggaran sebagai berikut:

**Tabel 3.17**
**Perbandingan Kinerja dan Anggaran**

| INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA INDIKATOR | REALISASI KINERJA INDIKATOR | CAPAIAN KINERJA INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU PERUBAHAN | REALISASI PAGU | CAPAIAN REALISASI % | % KINERJA DAN ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | **BELANJA APBD** | **29.000.855.441** | **27.567.970.423** | **95,06** | |
| **Pertumbuhan sektor industri pengolahan (%)** | **5,8** | **0,47** | **8,10** | **TOTAL ANGGARAN PENDUKUNG INDIKATOR SASARAN I** | **6.943.947.410** | **6.863.033.302** | **98,83** | **8,19** |
| | | | | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | **6.671.947.410** | **6.591.093.082** | **98,79** | |
| | | | | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | 6.671.947.410 | 6.591.093.082 | 98,79 | |
| | | | | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** | **225.000.000** | **224.940.220** | **99,97** | |
| | | | | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | 225.000.000 | 224.940.220 | 99,97 | |
| | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | **47.000.000** | **47.000.000** | **100,00** | |
| | | | | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 47.000.000 | 47.000.000 | 100,00 | |

| INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA INDIKATOR | REALISASI KINERJA INDIKATOR | CAPAIAN KINERJA INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU PERUBAHAN | REALISASI PAGU | CAPAIAN REALISASI % | % KINERJA DAN ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)** | **6,3** | **15,35** | **243,65** | **TOTAL ANGGARAN PENDUKUNG INDIKATOR SASARAN II** | **21.023.908.031** | **19.682.335.121** | **93,61** | **260,28** |
| | | | | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | **1.054.840.000** | **1.006.195.400** | **95,39** | |
| | | | | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | 142.840.000 | 130.999.400 | 91,71 | |
| | | | | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | 799.000.000 | 770.236.000 | 96,40 | |
| | | | | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | 113.000.000 | 104.960.000 | 92,88 | |
| | | | | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | **1.643.500.000** | **1.638.159.730** | **99,68** | |
| | | | | Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | 353.500.000 | 351.889.500 | 99,54 | |
| | | | | Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri | 1.290.000.000 | 1.286.270.230 | 99,71 | |
| | | | | **PENUNJANG** | | | | |
| | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH** | **18.325.568.031** | **17.037.979.991** | **92,97** | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 219.794.637 | 219.000.200 | 99,64 | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 13.897.458.934 | 12.746.678.637 | 91,72 | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 85.184.000 | 81.339.000 | 95,49 | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.563.040.460 | 1.547.825.887 | 99,03 | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat | 34.000.000 | 32.851.000 | 96,62 | |

| INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA INDIKATOR | REALISASI KINERJA INDIKATOR | CAPAIAN KINERJA INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU PERUBAHAN | REALISASI PAGU | CAPAIAN REALISASI % | % KINERJA DAN ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Daerah | | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.516.670.000 | 1.439.348.740 | 94,90 | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.009.420.000 | 970.936.527 | 96,19 | |
| **Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US$)** | **3,48** | **5,61** | **161,20** | **TOTAL ANGGARAN PENDUKUNG INDIKATOR SASARAN III** | **458.000.000** | **458.000.000** | **100,00** | **161,20** |
| | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | **458.000.000** | **458.000.000** | **100,00** | |
| | | | | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 458.000.000 | 458.000.000 | 100,00 | |
| **Andil Inflasi Bahan Makanan (%)** | **≤ 1,5** | **0,91** | **100** | **TOTAL ANGGARAN PENDUKUNG INDIKATOR SASARAN IV** | **575.000.000** | **564.602.000** | **98,19** | **101,84** |
| | | | | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | **575.000.000** | **564.602.000** | **98,19** | |
| | | | | Pengendalian Harga Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan | 511.080.000 | 510.982.000 | 99,98 | |
| | | | | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi Dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya | 200.000.000 | 191.740.000 | 95,87 | |

## 3.5 Prestasi Yang Dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2022

| No. | Nama Penghargaan | Pemberi Penghargaan | Agenda Kerja Utama Yang Didukung |
|---|---|---|---|
| 1. | Penghargaan Industri Hijau 2022 | Kementerian Perindustrian Republik Indonesia | Mengembangkan industri pengolahan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru |
| 2. | Anugerah Bangga Buatan Indonesia 2022 | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Kementerian BUMN Republik Indonesia | Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi |

## 3.6 Inovasi Terbaru

Pada tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung melakukan inovasi berupa pengembangan aplikasi yaitu:

1. SIGAP LAMPUNG (Sistem Informasi Harga Pasar Provinsi Lampung), merupakan aplikasi yang berguna untuk masyarakat, stakeholder dan pengambil kebijakan agar dapat mengetahui perubahan harga komoditas pasar di Provinsi Lampung secara harian. Aplikasi ini juga di dukung dengan fitur sistem laporan dan analisa data agar memudahkan pengguna aplikasi. Pada tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung melakukan pengembangan yaitu penambahan beberapa fitur pada aplikasi tersebut.
2. Gallery SiKAM (Sistem Informasi IKM Lampung dan Produk IKM), yaitu sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai sarana komunikasi secara virtual dan digital, dimana para UKM/IKM dapat membagi informasi mengenai tetang produk, jenis usaha, standarisasi produk kepada konsumen. Pemasaran digital yang di desain sedemikian rupa oleh para software engineering masing-masing platform penyedia layanan pemasaran digital dapat dimanfaatkan oleh para penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi dan berinteraktif secara langsung. Pada tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung melakukan pengembangan aplikasi berbasis web menjadi aplikasi berbasis smartphone.

## 3.7 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305
Email : disperindag@lampungprov.go.id
BANDAR LAMPUNG

**TINDAKLANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI**
**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA**
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**Nomor LHE : 700/17.R/IV.01/10/2022**
**Tanggal : 6 Juli 2022**

1. **Evaluasi atas perencanaan kinerja**
   a. Dokumen perencanaan agar disusun secara cermat sehingga dapat berlaku sesuai periodenya, tidak selalu direvisi.
   b. Indikator kinerja telah disusun dan telah memenuhi kriteria SMART dan mencerminkan kinerja perangkat daerah tersebut.
   c. Agar rencana aksi disusun secara dinamis dan dapat dipantau capaiannya secara berkala.

   **Tindak Lanjut**

   a. Tindak lanjut yang dilakukan adalah dokumen perencanaan (Renstra) telah disusun secara cermat. Perubahan pada dokumen perencanaan dilakukan untuk penyesuaian dengan perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Perubahan IKU menyesuaikan dengan kondisi Covid 19 dimana target indikator perlu dilakukan penyesuaian.
   b. Tindak lanjut yang dilakukan adalah Indikator Kinerja Disperindag Provinsi Lampung telah sesuai dengan kriteria SMART dan menggambarkan kinerja dari Disperindag Prov. Lampung;
   c. Tindak lanjut yang dilakukan adalah rencana aksi telah disusun setiap tahun serta evaluasi dilakukan secara berkala tiap triwulan;

**2. Evaluasi atas pengukuran kinerja**

a. Agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dapat menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.

b. Agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dapat menyusun mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja..

c. Agar data terkait pencapaian kinerja dapat menjadi dasar dalam penyesuaian pemberian/pengurangan tunjangan.

**Tindak Lanjut**

a. Tindak lanjut yang dilakukan adalah telah disusunnya formulasi terhadap indikator kinerja yang tertuang pada perjanjian kinerja mulai dari Kepala Dinas samapi dengan level staf dan penggunaan aplikasi data industri dan perdagangan dalam pengumpulan data kinerja yang diinput pada aplikasi Adinda Lampung dengan alamat https://adinda.disperindag.lampungprov.go.id.

b. Tindak lanjut yang dilakukan adalah penggunaan aplikasi data industri dan perdagangan dalam pengumpulan data kinerja data kinerja yang diinput pada aplikasi Adinda Lampung dengan alamat https://adinda.disperindag.lampungprov.go.id;

c. Tindak lanjut yang dilakukan adalah menggunakan e-kinerja sebagai dasar pemberian/pengurangan tunjangan pada ASN.

**3. Evaluasi atas pelaporan kinerja**

a. Agar dokumen laporan kinerja dapat memuat/mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.

b. Agar dokumen laporan kinerja dapat menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja.

**Tindak Lanjut**

a. Tindak lanjut yang dilakukan adalah pada dokumen LKIP telah memuat seluruh informasi mengenai pencapaian kinerja per indikator beserta pencapaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung masing–masing indikator juga faktor pendukung keberhasilan, faktor penghambat, masalah maupun hambatan yang dihadapi;

b. Tindak lanjut yang dilakukan adalah pada dokumen LKIP telah disajikan dan dijabarkan penyesuaian anggaran yang mendukung masing–masing program, yang mendukung pencapaian masing–masing indikator kinerja

dan menunjukan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja.

**4. Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal**

a. Agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dapat menindaklanjuti seluruh rekomendasi, evaluasi SAKIP tahun sebelumnya.

b. Agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dapat memanfaatkan hasil evaluasi SAKIP untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

**Tindak Lanjut**

a. Tindak lanjut yang dilakukan adalah seluruh rekomendasi telah ditindak lanjuti.

b. Tindak lanjut yang dilakukan adalah hasil evaluasi SAKIP digunakan sebagai salah satu acuan untuk meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

**KEPALA DINAS,**

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

**ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.**
Pembina Utama Muda
NIP. 19730524 199703 2 002

# BAB IV
# PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2022 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 27,24%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100%
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100%
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, 3 sasaran mencapai kriteria penilaian realisasi kinerja **sangat tinggi**.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Lampung Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 29.000.855.441,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.567.970.423,- atau sebesar 95,06% yang terdiri dari 8

Program dan 16 Kegiatan. Hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung masih perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Provinsi Lampung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lainyang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.

# LAMPIRAN

**MATRIK CASCADING PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2019-2024**
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

**Misi 5 : "Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan"**

| RPJMD | | | | | | RENSTRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TUJUAN | | | | SASARAN | | | | | | | PROGRAM | | | SUB KEGIATAN | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | TARGET | | | | | | | | | | | | TARGET KINERJA | | | |
| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI AWAL | TARGET TH KE 5 | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | NAMA PROGRAM | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | NAMA SUB KEGIATAN | SASARAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | SATUAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Perekonomian Daerah | Pertumbuhan Ekonomi | 4,5 - 5,5 | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi | Laju pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi | Laju pertumbuhan ekonomi | 5,27 | 4,5 - 5,5 | Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan | Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan | - | 5 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Meningkatnya perkembangan industri di Provinsi Lampung | Persentase Pertumbuhan Unit Industri di Provinsi (%) | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Terlaksananya kegiatan pengembangan kawasan industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Dokumen | - | - | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Terselenggaranya Peningkatan Kompetensi SDM Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Dokumen | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Dokumen | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Terlaksananya kegiatan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Dokumen | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Terlaksananya kegiatan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | dokumen | - | - | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Program Pengendalian Izin Usaha | Meningkatnya cakupan pengawasan IUI yang dipantau | Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%) | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar; dan2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas | Dokumen | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi | Tersedianya Dokumen Hasil Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan | Dokumen | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Meningkatnya perusahaan industri yang masuk ke dalam SIINAS | Persentase perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri kab/kota yang masuk SIINAS | Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINAS | Tersedianya Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas | Dokumen | - | - | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINAS | Tersedianya Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas | Dokumen | - | - | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan | Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan | - | 5,3 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | Program Standardidasi dan Perlindungan Konsumen | Meningkatnya perlindungan konsumen di Provinsi Lampung | Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen | Terlaksananya kegiatan pemberdayaan konsumen | Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif | Unit | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

| RPJMD | | | | | | RENSTRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TUJUAN | | | | SASARAN | | | | | | | PROGRAM | | | SUB KEGIATAN | | | | | | | | |
| | | | | | | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI AWAL | TARGET TH KE 5 | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET | | | | | NAMA PROGRAM | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | NAMA SUB KEGIATAN | SASARAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | SATUAN | TARGET KINERJA | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Verifikasi mutu produk | Terlaskananya verifikasi mutu produk di kab/kota | Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau | Komoditi | - | - | 6 | 6 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pengembangan Layanan pengujian | Terlaksananya pengembangan layanan pengujian | Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang | Dokumen | - | 3 | 12 | 12 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pengembangan Layanan Sertifikasi | Terlaksanannya layanan sertifikasi | Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan | Sertifikat | - | 1.896 | 1.915 | 1.935 | 1.955 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pengembangan Layanan Kalibrasi | Terlaksananya layanan kalibrasi | Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan | Sertifikat | - | 35 | 40 | 45 | 50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen | Terlaksannya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi | Laporan | - | 12 | 20 | 25 | 35 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen | Terlaksananya fasilitasi penanganan terhadap pelanggaran atas ketentuan perlindungan konsumen | Jumlah Kasus yang Ditangani | Kegiatan | - | - | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Meningkatnya jangkauan pe,asaran produk - produk IKM Provinsi Lampung | Persentase IKM/PKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran | Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | Terpromosikannya produk UKM/PKM binaan | Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada | UMKM | - | - | 10 | 15 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi | Terfasilitasinya peningkatan kualitas produk UKM/PKM | Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder | Laporan | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | Terlaksananya peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan | Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | Dokumen | - | - | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri (milliar US$) | Nilai Ekspor non migas (milliar US$) | 3,5 | 3,33 | 3,48 | 3,65 | 3,8 | Program Pengembangan Ekspor | Meningkatnya IKM yang berhasil eskpor | Persentase IKM yang berhasil melakukan ekspor dari IKM yang dilatih Bimtek Ekspor setiap tahun | Peningkatan Citra produk ekspor | Terlaksananya Promosi UKM/PKM berorientasi ekspor | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi | Produk | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usaha Calon ekspotir dan Eksportir Pemula tentang Ekspor | Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina | Pelaku Usaha | - | 40 | 80 | 100 | 125 |
| | | | | Menjaga stabilitas harga | Laju Inflasi | Menjaga stabilitas harga | Laju Inflasi | 3.0 ± 1 | 3.0 ± 1 | Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting | Andil inflasi bahan makanan | 0,10 - 0,50 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 2 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Terjaganya stabilitas harga bahan pangan pokok penting | Nilai Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antarwaktu | Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab kota | Tersusunnya Laporan Pergerakan Harga Harian untuk Bahan Pokok serta barang strategis | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota | Laporan | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Terlaksananya kegiatan pasar murah menjelang HBKN | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah | Laporan | - | 5 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi | Terselenggaranya pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | Laporan | - | - | 1 | 1 | 1 |

| RPJMD | | | | | | RENSTRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TUJUAN | | | | SASARAN | | | | | | | PROGRAM | | | SUB KEGIATAN | | | | | | | | |
| | | | | | | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI AWAL | TARGET TH KE 5 | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET | | | | | NAMA PROGRAM | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | NAMA SUB KEGIATAN | SASARAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | SATUAN | TARGET KINERJA | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | - | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Laporan dan Evaluasi kinerja | Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah | Laporan | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terlaksanya Pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | - | 12 | 112 | 120 | 120 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan | Laporan | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan | Laporan | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD pada Perangkat Daerah | Tersedianya laporan BMD Perangkat daerah | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | - | - | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penatausahaan BMD pada Perangkat daerah | Terlaksananya penatausahaan BMD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | - | - | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai | Terfasilitasinya peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | - | 15 | 15 | 18 | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | - | 50 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Paket | - | 500 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah tangga | Tersedianya peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | Paket | - | 50 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | Paket | - | 200.000 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan bahan/material | Tersedianya bahan/material Kebutuhan Pameran | Jumlah Paket bahan/material yang disediakan | Paket | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terfasilitasinya kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | - | 40 | 50 | 55 | 65 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | - | 45 | 55 | 70 | 85 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | - | 100 | 1 | 1 | 1 |

| RPJMD | | | | | | RENSTRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TUJUAN | | | | SASARAN | | | | | | | PROGRAM | | | SUB KEGIATAN | | | | | | | |
| | | | | | | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI AWAL | TARGET TH KE 5 | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET | | | | | NAMA PROGRAM | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | NAMA SUB KEGIATAN | SASARAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | SATUAN | TARGET KINERJA | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor | Terlaksannya pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan | Laporan | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Terpeliharanya gedung kantor | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya | Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | - | 35 | 60 | 50 | 60 |

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

**KEPUTUSAN**
**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPROVINSI LAMPUNG**
Nomor : 015/KP/V.26/Sekret.1/I/2022

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;

MEMUTUSKAN :

| | | |
|---|---|---|
| Menetapkan | : | PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 - 2024. |
| KESATU | : | Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. |
| KEDUA | : | Indikator Kinerja Utama disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. |
| KETIGA | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan : Bandar Lampung
Pada tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA DINAS

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

**Elvira Umihanni, S.P., M.T.**
Pembina Utama Muda
NIP. 19730524 199703 2 02

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
Nomor : 015/KEP/V.26/Sekret.1/I/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | | Indikator Sasaran | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan | Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (%) | 1 | Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan | Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%) | 20,15 | 20,5 | 20,85 | 21,2 | 21,56 |
| | | Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (%) | 2 | Meningkatkan Kontribusi sektor perdagangan | Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB (%) | 11,2 | 11,25 | 11,3 | 11,35 | 11,4 |
| | | | 3 | Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri | Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US$) | 3,5 | 3,55 | 3,6 | 3,7 | 3,8 |
| 2 | Menjaga Stabilitas harga | Laju inflasi (%) | 4 | Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting | Andil inflasi bahan makanan (%) | 0,10 – 0,50 | 0,10 – 0,51 | 0,10 – 0,52 | 0,10 – 0,54 | 0,10 – 0,55 |

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA (IKU)**
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan | Sumber Data | Target Kinerja Pada Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan | Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%) | ***Makna Indikator :***<br>Jumlah Nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh lapangan usaha (kategori) industri pengolahan<br><br>***Alasan Pemilihan*** **:**<br>Indikator ini merepresentasikan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Dinas Perindag Provinsi Lampung dalam urusan perdagangan<br><br>***Rumus Perhitungan*** **:**<br>(PDB Industri Pengolahan $_{t}$ – PDB Industri Pengolahan $_{t-1}$ / PDB Industri pengolahan$_{t-1}$) x 100% | BPS | - | 5 | 5,8 | 6 | 6,3 |
| 2 | Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan | Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%) | ***Makna Indikator :***<br>Jumlah Nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh lapangan usaha (kategori) perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.<br><br>***Alasan Pemilihan*** **:**<br>Indikator ini merepresentasikan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Dinas Perindag Provinsi Lampung dalam urusan perindustrian<br><br>***Rumus Perhitungan*** **:** | BPS | - | 5,3 | 6,3 | 6,8 | 7,2 |

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan | Sumber Data | Target Kinerja Pada Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | (PDB Perdagangan $_{t}$ – PDB Perdagangan $_{t-1}$ / PDB Perdagangan $_{t-1}$) x 100% | | | | | | |
| 3 | Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri | Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US$) | ***Makna Indikator :***<br>Kinerja ekspor Provinsi Lampung yang mengacu pada nilai Free On Board (FOB) dan dinyatakan dalam Dollar Amerika (US$)<br><br>***Alasan Pemilihan*** **:**<br>Indikator ini merepresentasikan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Dinas Perindag Provinsi Lampung secara spesifik dalam perdagangan luar negeri<br><br>***Rumus Perhitungan*** **:**<br>Nilai Ekspor Januari + ……. + Nilai Ekspor Desember | BPS | - | 3,3 | 3,48 | 3,65 | 3,8 |
| 4 | Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting | Andil inflasi bahan makanan (%) | ***Makna Indikator :***<br>Menggambarkan andil/sumbangan pembentukan nilai inflasi dari kelompok bahan makanan<br><br>***Alasan Pemilihan*** **:**<br>Indikator ini merepresentasikan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Dinas Perindag Provinsi Lampung secara spesifik dalam pengendalian inflasi<br><br>***Rumus Perhitungan*** **:** | BPS | - | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 2 |

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan | Sumber Data | Target Kinerja Pada Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | Andil Inflasi Bahan Makanan januari + ……. + Andil Inflasi Makanan Desember | | | | | | |